



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/ 9 /KUM/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Perkada dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing, dan selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Perkada dan Peraturan DPRD ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri a quo, maka perlu menyusun dan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Propemperkada Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan dalam hal :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. adanya kebutuhan regulasi dan/atau mengatasi keadaan tertentu lainnya yang dapat dipastikan urgensinya;
 - d. adanya perintah dan/atau dari peraturan perundangan yang lebih tinggi setelah Propemperkada ditetapkan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai.
2. Kepala Bappedalitbang Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/ **9** /KUM/2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

**DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025**

NO.	SKPD PEMRAKARS	JUDUL PERKADA	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1.	BPKAD	1. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	UU 23/2014 PMDN 77/2020	Tindaklanjut amanat Peraturan Perundang-undangan
2.	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025		UU 23/2014 PMDN 77/2020	Tindaklanjut amanat Peraturan Perundang-undangan
3.	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026		UU 23/2014 PMDN 77/2020	Tindaklanjut amanat Peraturan Perundang-undangan
4.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara		UU 23/2014 PMDN 77/2020	Tindaklanjut amanat Peraturan Perundang-undangan
5.	Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Rese Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2026	Perda Kab. HSU 8/2017		Tindaklanjut amanat Peraturan Perundang-undangan

NO.	SKPD PEMRAKARSA	JUDUL PERKADA	DASAR HUKUM	KETERANGAN
2.	Bappedalitbang	6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	UU 25/2004 UU 23/2014 PP 8/2008 PMDN 86/2017	Sebagai acuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah selama 5 Tahun (2025-2029) dan penyusunannya berpedoman pada RPJMD 2025-2029
7.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Rencana Kerja UU 25/2004 UU 23/2014 PP 8/2008 PMDN 86/2017	UU 25/2004 UU 23/2014 PP 8/2008 PMDN 86/2017	Tindak Lanjut Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026		UU 25/2004 UU 23/2014 PP 8/2008 PMDN 86/2017	Tindak Lanjut Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9.	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023		Tindak Lanjut Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023
10.	Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Hulu Sungai Utara	UU 14/2008 UU 4/2011 PP 45/2021 Perpres 27/2014		Penyelenggaraan Simpul Jaringan Daerah adalah informasi menyeragamkan geospasial dasar dan mensinergikan IGT di Daerah melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutahir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid,

NO.	SKPD PEMRAKARSA	JUDUL PERKADA	DASAR HUKUM	KETERANGAN
				mudah diakses dan berkelanjutan
3.	Dinas Ketahanan Pangan	11. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan /Sustainable Development Goals Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2026	Perpres 111/2022 Perpres 18/2020	Sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Hulu Sungai Utara
4.	Dinas Pertanian	12. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026	UU No. 18 Tahun 2012 PP No. 17 Tahun 2015	Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan
5.	Dinas PU/PUPR	13. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	UU No. 18 Tahun 2012 PP No. 17 Tahun 2015	Perubahan perlu dilakukan dikarenakan adanya perubahan harga eceran tertinggi gabah dan untuk cadangan pangan pemerintah bisa berupa beras
6.	Bagian Ekonomi	14. Penyuluhan Pertanian Swadaya	UU No. 16 Tahun 2006 UU No. 19 Tahun 2013 PP No. 43 Tahun 2009	Dalam rangka pembangunan di bidang pertanian dan untuk menumbuh kembangkan kemampuan dan kemandirian petani di Kabupaten Hulu Sungai Utara
		15. Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Amuntai	UU No. 2 Tahun 2022	Rencana Rinci Tata Ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum Tata Ruang
		16. Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Alabio	UU No. 2 Tahun 2022	Rencana Rinci Tata Ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum Tata Ruang
		17. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	PP No. 54 Tahun 2017	Tindak Lanjut Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

NO.	SKPD PEMRAKARSA	JUDUL PERKADA	DASSAR HUKUM	KETERANGAN
7.	BPBD	18. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029	PP No. 21 Tahun 2028 Perda Kab. HSU No. 6 Tahun 2022	Tindak Lanjut Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
8.	DPMD	19. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2027 20. Penyusunan Perencanaan Desa	Perda Kab. HSU No. 6 Tahun 2022	Tindak Lanjut Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kab. HSU Nomor 6 Tahun 2022
		21. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Permendagri No. 114 Tahun 2014 Permendes No. 21 Tahun 2020	Dalam rangka keseragaman dan penyamaan persepsi mengingat ada 2 (dua) kementerian yang mengatur kegiatan Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
		22. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Surat Edaran Bupati No. 100.3.4.2/86/KUM/2024 Perbup tentang Perjadin	Tindak Lanjut PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendesa No. 3 Tahun 2021
		23. Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana bagi Hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026	PP No. 43 Tahun 2014 UU No. 6 Tahun 2014	Menyesuaikan dengan Peraturan terbaru
		24. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Tindak Lanjut Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

NO.	SKPD PEMRAKARSA	JUDUL PERKADA	DASAR HUKUM	KETERANGAN
25.	Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014	Tindak Lanjut Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
26.	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Permendagri No. 13 Tahun 2024	Sebagai kerangka acuan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKD dan LAD di Kabupaten Hulu Sungai Utara	
6.	BKPSDM	UU No. 20 Tahun 2023 PP No. 11 Tahun 2017 Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019	Dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN serta memberikan kesempatan yang sama bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	
27.	Tata Cara dan Mekanisme Promosi dan Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	PP No. 49 Tahun 2018	Tindak Lanjut Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	
28.	Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Perpres No. 67 Tahun 2021	Tindak Lanjut Pasal 24 ayat (2)	
7.	Dinas Kesehatan	Perpres No. 67 Tahun 2021	Perpres No. 67 Tahun 2021	
8.	DPRD	PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023	Tindak Lanjut Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (8), Pasal 18 ayat (5), Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak	
30.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang	Perda Kab HSU No. 8 Tahun 2017		

NO.	SKPD PEMRAKARSA	JUDUL PERKADA	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Perbup Kab. HSU No. 5 Tahun 2023	Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
9.	Bagian Umum	31. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penggunaan Bahan Bakar Minyak Non-Subsidi bagi Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Perpres 33 Tahun 2020 Perbup No. 56/2020	Tindak Lanjut Pasal 21 Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Perjalanan Dinas bagi DPRD dan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN